

# IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU TANI DI DESA PANGKALAN KECAMATAN LANGKAPLANCAR KABUPATEN PANGANDARAN

Yusup Nugraha<sup>1</sup>, Agus Dedi<sup>2</sup>, S. Munir<sup>3</sup>

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

E-mail: yusupnugraha@gmail.com

## ABSTRAK

*Hasil observasi diketahui bahwa implementasi program Kartu Tani di Desa Pangkalan Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran belum optimal. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Program Kartu Tani di Desa Pangkalan Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Informan sebanyak 11 orang. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara) dan dokumentasi. Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui pengolahan data hasil wawancara dan observasi untuk ditarik kesimpulan sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi program Kartu Tani belum terlaksana secara optimal sesuai dengan pendapat Wahab (2014:165), tentang variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program hal ini dikarenakan beberapa masyarakat kelompok tani di desa kurang memahami tujuan dan manfaat dari program kartu tani, masih adanya kesalahan dari petugas dalam menginput data masyarakat kelompok petani di desa ke dalam data base, kurangnya apresiasi dari masyarakat kelompok tani di desa untuk melakukan evaluasi program kartu tani, kurang terbuka pada saat ketersediaan pupuk bersubsidi di tingkat pengecer yang pada kenyataannya masih kurang dan tidak sesuai dengan kebutuhan petani di desa.*

**Kata Kunci:** *Implementasi, Program Kartu Tani.*

## PENDAHULUAN

Sektor pertanian menjadi salah satu tumpuan ekonomi, sehingga pertanian memiliki peran penting dalam mengembangkan peran penting di bidang ekonomi pembangunan. Tujuan umum dari berbagai kebijakan yakni, petani Indonesia diharapkan memiliki kemandirian dan pengembangan sumber daya manusia,

dengan begitu hasil produktivitas akan mengalami peningkatan.

Namun sangat disayangkan kehidupan petani di Indonesia saat ini masih bisa dibilang berada di bawah garis kemiskinan, sedangkan kita ketahui bahwa sektor pertanian merupakan penyumbang besar pendapatan negara. Sangat disayangkan apabila kesejahteraan masyarakat

petani di Indonesia ini masih berada pada tingkat kemiskinan. Hal ini menjadi tugas penting bagi pemerintah untuk mencari alternatif-alternatif yang dapat memberikan dampak membaiknya kesejahteraan masyarakat petani.

Pembangunan pertanian di Indonesia bertujuan untuk menyejahterakan petani melalui subsidi input usaha tani (pupuk dan benih) maupun penerapan teknologi baru sehingga dapat meningkatkan produksi pertanian (Moko dkk, 2017:9). Salah satu faktor produksi yang sangat penting dalam peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian adalah ketersediaan pupuk bersubsidi untuk para petani. Sebagai bentuk perlindungan terhadap petani, pemerintah sudah mengimplementasikan dalam Kartu Tani yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Upaya pemerintah dalam penanganan terkait masalah-masalah yang terjadi terhadap petani, baik itu dalam hal pengawasan, pengadaan, dan penyaluran pupuk bersubsidi yaitu melalui program penyaluran pupuk bersubsidi melalui Kartu Tani, yang di dasari dengan adanya Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pertanian No.

69/Permentan/SR.310/12/2016 tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian TA 2017; Peraturan Menteri Perdagangan No. 15/M-Dag/Per/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

Menurut Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 dinyatakan bahwa : “Kartu Tani adalah kartu yang dikeluarkan oleh Perbankan kepada Petani untuk digunakan dalam transaksi penebusan pupuk bersubsidi melalui mesin *Electronic Data Capture* di pengecer resmi”, tujuan diterapkannya kartu tani yaitu guna mewujudkan distribusi, pengendalian dan pengawasan pupuk bersubsidi yang transparan dan tepat sasaran kepada petani yang memang berhak untuk menerimanya. Dengan adanya kartu tani diharapkan dapat mewujudkan penyaluran pupuk bersubsidi yang lebih transparan dan tepat sasaran sesuai dengan 6T (enam tepat) yang meliputi Tepat Jenis, Jumlah, Harga, Tempat, Waktu, dan Mutu.” yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kartu Tani memiliki beberapa manfaat bagi petani, diantaranya yaitu ketersediaan saprotan bersubsidi/nonsubsidi yang lebih pasti, kemudahan dalam menjual hasil panen tanpa melalui perantara, memudahkan akses pembiayaan, menumbuhkan kebiasaan menabung, biaya simpanan yang lebih ringan, memudahkan

mendapat subsidi, memudahkan mendapatkan bantuan sosial.

Kebijakan ini dibuat berangkat dari berbagai peristiwa atas tindak penyimpangan pupuk bersubsidi sehingga memberikan dampak negatif yang merugikan bagi berbagai pihak, terutama bagi petani. Dengan begitu, diharapkan melalui program Kartu Tani penyaluran pupuk bersubsidi akan lebih terjamin dan tepat sasaran.

Kabupaten Pangandaran sebagai salah satu wilayah pertanian yang masih cukup luas sudah mulai melaksanakan distribusi Kartu Tani kepada para petani yang memiliki hak untuk menggunakan pupuk bersubsidi. Desa Pangkalan Kecamatan Langkaplancar merupakan salah satu desa di Kabupaten Pangandaran yang memiliki lahan pertanian yang cukup luas sehingga kebutuhan petani terhadap kartu tani sangatlah besar. Meski demikian, dalam penerapannya beberapa petani mengaku belum merasakan manfaat yang didapatkan dari Kartu Tani yang diperolehnya. Hal ini salah satunya disebabkan karena Kartu Tani belum bisa digunakan sepenuhnya sebagai alat transaksi untuk menebus pupuk bersubsidi. Masalah lain yang dihadapi dalam penyaluran pupuk bersubsidi melalui Kartu Tani adalah kesulitan yang dihadapi para stakeholder yaitu Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang bertugas mendata penerima Kartu Tani sebagai alat untuk menebus pupuk bersubsidi apabila terdapat perubahan

data komoditas tanam atau perubahan status petani penyewa lahan.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Wahab (2014:64). Adalah : Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)

Dengan demikian implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, Peraturan Pemerintah,

Sebab itu fungsi implementasi mencakup pula penciptaan apa yang Dalam ilmu kebijakan publik disebut "*policy delivery system*" (sistem penyampaian/penerusan kebijakan publik) yang biasanya terdiri dari cara-cara atau saran-sarana tertentu yang dirancang atau didesain secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang dikehendaki.

Menurut pendapat Winarno (2012 : 101 – 202), implementasi adalah:

Alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakannya meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang dapat dipahami sebagai proses, keluaran (*output*) maupun sebagai hasil.

Sedangkan Meter dan Horn dalam Agustino (2016:139), mendefinisikan implementasi sebagai: “tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan kebijaksanaan.

Dalam proses implementasi suatu program sesungguhnya dapat berhasil, kurang berhasil, ataupun gagal sama sekali apabila ditinjau dari wujud hasil yang dicapai atau *outcomes*.

Rohman (2009:101) menyebutkan bahwa implementasi program merupakan : “Salah satu komponen dalam suatu kebijakan.

Implementasi program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan”.

Menurut pendapat Adisasmita (2011:73) mengemukakan : Suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. Pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh *output* program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program.

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa evaluasi merupakan suatu proses untuk menentukan relevansi, efisiensi, efektivitas dan dampak kegiatan program atau proyek yang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai serta sistematis dan objektif.

Selanjutnya menurut Fauziah (2007:56), mengemukakan bahwa “Dalam menilai keefektifan suatu program atau proyek maka harus melihat pencapaian hasil kegiatan program atau proyek yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan”.

Dengan demikian evaluasi program adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program atau proyek yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Hadirnya program kartu tani dilatarbelakangi oleh keinginan peningkatan produktivitas petani dalam usaha tani, Implementasi Kartu Tani sebagai bentuk perlindungan pemerintah terhadap petani sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Menurut Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 dinyatakan bahwa : “Kartu Tani adalah kartu yang dikeluarkan oleh Perbankan kepada Petani untuk digunakan dalam transaksi penebusan pupuk bersubsidi melalui mesin *Electronic Data Capture* di pengecer resmi”.

Selanjutnya dalam Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor/11/Kpts/Sr.310/B/03/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2020 dinyatakan bahwa :” Kartu Tani adalah kartu yang dikeluarkan oleh Perbankan kepada Petani untuk digunakan dalam transaksi penebusan pupuk bersubsidi melalui mesin *Electronic Data Capture* di pengecer resmi”.

Dengan demikian dengan adanya Kartu Tani, petani menebus pupuk dengan membawa Kartu Tani ke kios resmi. Oleh karena itu setiap petani wajib memiliki Kartu Tani. Kartu tani merupakan alat untuk membantu petani dalam menjalankan kegiatannya, seperti untuk mendapatkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR), penyediaan pupuk, hingga pengumpulan hasil panen.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yang menurut Sugiyono (2017 : 2) yang dimaksud dengan metode penelitian adalah sebagai berikut : "Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.”

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong, (2014:2) pendekatan kualitatif yaitu “Data yang dikumpulkan cenderung bersifat naratif dari pada angka-angka yang hasil analisisnya berupa uraian-uraian yang sangat deskriptif dan berdasarkan pada analisis data secara induktif”.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Standar/ukuran dan tujuan kebijakan**

#### **a. Adanya tujuan yang jelas dari implementasi program kartu tani**

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa masih adanya beberapa masyarakat kelompok tani di desa yang

kurang memahami tujuan dan manfaat dari program kartu tani sehingga masih banyak yang belum menggunakannya, oleh karena itu sudah adanya upaya yaitu melakukan temu wicara untuk memberikan penyuluhan agar dapat meningkatkan pemahaman mengenai tujuan dari implementasi program kartu tani di desa, yaitu untuk mencegah kebocoran pupuk subsidi kepada petani dan pupuk disalurkan tepat sasaran sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat. 6 (enam) tepat itu yaitu tepat jumlah, harga, tempat, mutu, jenis dan waktu.

**b. Adanya standar dan sasaran kebijakan untuk menyamakan persepsi dalam implementasi program kartu tani**

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa kurangnya dilakukan pembahasan terhadap program yang akan di laksanakan, adanya upaya yang dilakukan, yaitu melakukan forum diskusi untuk membahas tentang pelaksanaan program kartu tani di desa, dengan mengundang semua elemen yang berkepentingan dalam mengimplementasikan kebijakan tentang program kartu tani sehingga dapat di dipahami, seperti menyamakan persepsi terhadap administrasi atau alur prosedur dan SOP dalam mengimplementasikan program kartu tani.

**c. Adanya verifikasi yang dilakukan secara rutin untuk mengetahui kesesuaian dalam implementasi program kartu tani**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa kurang pro aktifnya penyuluh

lapangan untuk ikut serta dalam melakukan verifikasi data terhadap masyarakat kelompok tani di desa sehingga kurang memiliki data yang lengkap dan akurat dan hal ini akan mempersulit untuk melakukan verifikasi data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok petani di desa, oleh karena itu sudah adanya upaya yang di lakukan, yaitu melakukan verifikasi data secara langsung ke lapangan agar dapat memperoleh data yang lengkap dan akurat, sehingga dapat mempermudah terhadap petugas penyuluh lapangan untuk melakukan verifikasi data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok petani di desa

**2. Sumber-sumber kebijakan**

**a. Adanya sumber daya pelaksana yang memadai untuk mengimplementasikan program kartu tani**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa kurangnya pemahaman dari petugas penyuluh lapangan mengenai administrasi program kartu tani, dimana masih adanya kesalahan dalam menginput data masyarakat kelompok petani di desa ke dalam data base, dan hal ini akan menghambat dalam melakukan verifikasi terhadap RDKK, oleh karena itu sudah adanya upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan forum diskusi dengan petugas penyuluh di lapangan agar dapat lebih mempelajari dan memahami mengenai administrasi program kartu tani sehingga dapat mempermudah untuk melaksanakannya di lapangan, karena masyarakat

kelompok petani sekarang lebih peka dan lebih sensitif terhadap permasalahan di lapangan

**b. Adanya fasilitas pendukung yang memadai untuk mengimplementasikan program kartu tani**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa masih kurang optimalnya sambungan internet dan masih sering erornya mesin *Electronic Data Capture* (EDC) sehingga akan menghambat dalam mengimplementasikan program kartu tani, oleh karena itu sudah adanya upaya yang di lakukan, yaitu sudah mengajukan terhadap pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian setempat sebagai penanggungjawab dan pembina dalam pelaksanaan program, untuk menyediakan berbagai fasilitas yang mumpuni dan layak pakai sehingga tidak menghambat dalam mengimplementasikan program kartu tani di desa, seperti menyediakan sambungan internet yang optimal dan mesin *Electronic Data Capture* (EDC) yang siap pakai sehingga dapat mempermudah dalam mengimplementasikan program kartu tani.

**c. Adanya anggaran yang memadai dalam implementasi program kartu tani**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa selama ini masih kesulitan untuk mencairkan anggaran untuk keperluan operasionalisasi program kartu tani di desa sehingga menghambat untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang

program kartu tani di desa, oleh karena itu sudah adanya upaya yang dilakukan untuk mengatasi anggaran untuk melakukan operasionalisasi program kartu tani di desa, yaitu dengan mengajukan terhadap pimpinan mengenai anggaran untuk pelaksanaan operasionalisasi program kartu tani di desa, anggaran untuk mengadakan penyuluhan dan untuk melakukan sosialisasi tentang program katu tani di desa.

**3. Ciri-ciri atau karakteristik badan/instansi pelaksana**

**a. Adanya kesesuaian antara tingkat pendidikan dengan bidang pekerjaan untuk mengimplementasikan program kartu tani**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa selama ini untuk petugas penyuluh lapangan sudah sesuai dengan bidang pekerjaannya dan memiliki kompetensi dalam bidang pertanian, dan memang mengenai tingkat pendidikan sudah tidak adanya hambatan, karena memang sudah sesuai dengan bidang pekerjaannya walaupun memang dalam pelaksanaan di lapangan terkadang ada yang kurang dipahami karena terkadang pelaksanaan di lapangan kurang sesuai dengan teori yang ada, oleh karena itu dalam pelaksanaan di lapangan petugas penyuluh lapangan dituntut untuk terus belajar dan meningkatkan pemahaman dan kompetensinya sesuai dengan bidang pekerjaannya dan selain itu petugas penyuluh lapangan juga dituntut untuk turun langsung ke

masyarakat kelompok tani agar dapat belajar secara langsung di lapangan.

**b. Adanya tenaga pelaksana yang memiliki pengalaman untuk mengimplementasikan program kartu tani**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa untuk pelaksanaan di lapangan selain harus ditunjang dengan tingkat pendidikan yang sesuai dengan bidang pekerjaan tetapi juga di tuntut memiliki pengalaman, baik itu pengalaman dalam teknis pelaksanaan pekerjaan dalam mengimplementasikan berbagai program kerja di lapangan maupun pengalaman dalam menghadapi masyarakat yang dengan berbagai karakter, dan memang untuk petugas penyuluh lapangan kebanyakan memang yang sudah lama dan memang keseharian melakukan tugas pekerjaannya memberikan pendampingan terhadap masyarakat kelompok tani di desa sehingga sudah memiliki pengalaman.

**c. Adanya tenaga pelaksana yang memiliki integritas tinggi untuk mengimplementasikan program kartu tani**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa selama ini untuk integritas dalam pelaksanaan pekerjaan memang penting dan hal ini memang merupakan bentuk tanggung jawab moral dalam pelaksanaan pekerjaannya, dan hal ini memang harus di miliki oleh pegawai, apalagi bagi petugas penyuluh lapangan yang berhubungan langsung dengan masyarakat kelompok tani di desa sehingga harus meningkatkan

kepercayaannya, oleh karena itu dalam pelaksanaan di lapangan, petugas penyuluh lapangan selalu mengedepankan komunikasi dengan semua unsur yang berkepentingan dalam program kartu tani di desa sehingga dapat membangun kepercayaan terhadap pelaksanaan pekerjaannya, dan hal itu akan mempermudah dalam mengimplementasikan program kartu tani di desa.

**4. Komunikasi antarorganisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan**

**a. Adanya komunikasi yang dilakukan pegawai dengan penerima bantuan untuk memudahkan dalam pelaksanaan evaluasi implementasi program kartu tani**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa selama ini kurangnya apresiasi dari masyarakat kelompok tani di desa untuk melakukan pertemuan dalam forum diskusi dan temu wicara sehingga kesulitan untuk melakukan evaluasi tentang program kartu tani di desa, oleh karena itu sudah adanya upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan interaksi secara langsung dengan semua masyarakat kelompok tani di desa agar dapat mengajak untuk melakukan pertemuan dalam forum diskusi dan temu wicara sehingga dapat mempermudah untuk melakukan evaluasi terhadap program kartu tani yang sedang di laksanakan, dan hal ini akan mempercepat untuk mengetahui kesalahan dan kekurangan dalam

mengimplementasikan program kartu tani di desa.

**b. Menjalin komunikasi dengan Instansi yang memiliki hubungan birokrasi dalam implementasi program kartu tani**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa karena dengan berbagai kesibukan sehingga masih belum adanya waktu untuk melakukan pertemuan temu wicara dengan Dinas terkait, dan hal ini mempersulit terhadap masyarakat kelompok tani di desa untuk menyampaikan keinginan dan harapan dalam program kartu tani di desa, oleh karena itu sudah adanya upaya yang di lakukan, yaitu dengan memfasilitasi untuk melakukan forum pertemuan dan temu wicara dengan perwakilan pemerintah daerah dalam hal ini dengan Dinas Pertanian sebagai penanggungjawab dan pembinan dalam pelaksanaan program sehingga masyarakat dapat menyampaikan secara langsung keinginan dan harapan dalam program kartu tani di desa, seperti menyampaikan agar program kartu tani tidak rumit dan dapat lebih mempermudah untuk menyediakan kebutuhan masyarakat kelompok tani di desa.

**c. Adanya pembinaan yang dilakukan secara rutin kepada penerima bantuan hibah dan bantuan sosial dalam implementasi program kartu tani**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa kurang kooperatifnya masyarakat kelompok tani di desa untuk mengikuti pembinaan mengenai

peningkatan pemahaman dan pengetahuan mengenai peningkatan hasil pertanian bagi masyarakat kelompok tani di desa, oleh karena itu sudah adanya upaya yang di lakukan, yaitu dengan melakukan pendekatan dan merangkul ketua kelompok tani di desa untuk melakukan pertemuan agar dapat melakukan pembinaan, seperti memberikan pembinaan mengenai kemudahan dalam menjual hasil panen tanpa melalui perantara, pembinaan untuk penggunaan teknologi pertanian yang baru yang memungkinkan untuk dapat dipergunakan oleh kelompok tani serta pembinaan untuk kemudahan mendapatkan subsidi bahan pertanian.

**5. Sikap para pelaksana**

**a. Adanya komitmen yang jelas dari pelaksana dalam implementasi program kartu tani**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa komitmen dari pegawai merupakan bagian dari tanggung jawab moral sebagai pegawai sehingga memang semua unsur yang berkepentingan dalam program kartu tani harus memiliki komitmen yang tinggi sehingga dapat melaksanakan program secara optimal, dan dalam pelaksanaan di lapangan, hal ini sudah bukan merupakan hambatan lagi karena memang bagian dari kewajiban dan tanggung jawab moral sebagai pegawai untuk lebih disiplin dan lebih bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat kelompok tani di desa, oleh karena itu tinggal meningkatkan kesadaran dan tanggung jawabnya

karena semua pelaksana dalam program kartu tani di desa berkewajiban untuk mensukseskan program kartu tani karena hal ini merupakan program nasional untuk meningkatkan hasil pertanian dari masyarakat kelompok tani di desa.

**b. Adanya keterbukaan dalam memberikan informasi terkait implementasi program kartu tani**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa selama ini kurang terbuka pada saat ketersediaan pupuk bersubsidi di tingkat pengecer yang pada kenyataannya masih kurang dan tidak sesuai dengan kebutuhan petani di desa, oleh karena itu sudah adanya upaya yang di lakukan, yaitu sudah melakukan komunikasi dengan petugas penyuluh lapangan agar dapat mengkoordinasikan ke pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian sebagai penanggung jawab dan pembina dalam pelaksanaan program agar menyampaikan berbagai informasi secara transparan, seperti menyampaikan informasi mengenai kekurangan pasokan terhadap pupuk bersubsidi di tingkat pengecer sehingga dapat dipahami dan di mengerti oleh masyarakat kelompok tani di desa.

**6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik**

**a. Adanya dukungan dari Instansi teknis dalam implementasi program kartu tani**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa selama ini masih telatnya alokasi anggaran untuk kepentingan operasional kartu tani di desa, ataupun

masih kurang lengkapnya informasi mengenai program kartu tani di desa, oleh karena itu sudah adanya upaya yang dilakukan, yaitu dengan berusaha untuk melakukan koordinasi secara intensif dengan pimpinan di kantor Dinas untuk melaporkan berbagai perkembangan dalam pelaksanaan program kartu tani di desa sehingga dapat mengetahui situasi dan kondisi dan berbagai hambatan dalam pelaksanaan program di lapangan, dan hal ini akan mempermudah untuk mendapatkan dukungan secara penuh dan dapat mempermudah dalam pelaksanaan di lapangan.

**b. Adanya dukungan dari masyarakat kelompok tani di desa dalam implementasi program kartu tani**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa kurangnya kesadaran dan pemahaman dari masyarakat kelompok tani di desa terhadap program kartu tani sehingga terlihat masih kurang mendukung terhadap program kartu tani di desa, oleh karena itu sudah adanya upaya yang di lakukan, yaitu meminta bantuan terhadap pemerintah desa untuk memfasilitasi kegiatan pertemuan untuk melakukan temu wicara dengan semua masyarakat kelompok tani di desa sehingga dapat memberikan pengarahan dan penyuluhan tentang tujuan dan manfaat kartu tani di desa sehingga memahami dan mendukung terhadap pelaksanaan program kartu tani di desa.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa implementasi program Kartu Tani di Desa Pangkalan Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran, masih kurang sesuai dengan variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program, hal ini terlihat dari beberapa dimensi sebagai berikut :

### **Standar/ukuran dan tujuan kebijakan**

Masih adanya beberapa masyarakat kelompok tani di desa yang kurang memahami tujuan dan manfaat dari program kartu tani sehingga masih banyak yang belum menggunakannya hal ini dikarenakan kurangnya dilakukan pembahasan terhadap program yang akan di laksanakan sehingga kurang memahami standar dan tujuan dari kebijakan program kartu tani.

### **Sumber-sumber kebijakan**

Kurangnya pemahaman dari petugas penyuluh lapangan mengenai administrasi program kartu tani serta itu masih kurang optimalnya sambungan internet dan masih sering erornya mesin *Electronic Data Capture* (EDC) sehingga akan menghambat dalam mengimplementasikan program kartu tani. Selain itu kesulitan untuk mencairkan anggaran untuk keperluan operasionalisasi program kartu tani di desa.

### **Ciri-ciri atau karakteristik badan/instansi pelaksana**

Petugas penyuluh lapangan dituntut untuk terus belajar dan

meningkatkan pemahaman dan kompetensinya sesuai dengan bidang pekerjaannya dan selain itu petugas penyuluh lapangan juga dituntut untuk turun langsung ke masyarakat serta dituntut memiliki pengalaman sehingga petugas memiliki integritas dalam pelaksanaan pekerjaan.

### **Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan**

Kurangnya apresiasi dari masyarakat kelompok tani untuk melakukan pertemuan dalam forum diskusi dan temu wicara sehingga mempersulit terhadap masyarakat kelompok tani di desa untuk menyampaikan keinginan dan harapan dalam program kartu tani selain itu kurang kooperatifnya masyarakat kelompok tani di desa untuk mengikuti pembinaan mengenai peningkatan pemahaman dan pengetahuan kelompok tani.

### **Sikap para pelaksana**

Masih kurangnya komitmen pegawai dalam program kartu tani sehingga kurang terbuka dalam menyampaikan berbagai informasi kepada kelompok tani sehingga dapat dipahami dan di mengerti oleh masyarakat kelompok tani.

### **Lingkungan ekonomi, sosial dan politik**

Selama ini masih telatnya alokasi anggaran untuk kepentingan operasional kartu tani, ataupun masih kurang lengkapnya informasi mengenai program kartu tani selain itu kurangnya kesadaran dan pemahaman dari masyarakat kelompok tani terhadap

program kartu tani sehingga kurang mendukung terhadap program kartu tani

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya petugas penyuluh lapangan melakukan verifikasi terhadap masyarakat kelompok tani di desa baik verifikasi secara administrasi dengan melakukan pengecekan melalui KTP, KK dan NIK ataupun verifikasi secara langsung ke lapangan dengan mendatangi lokasi lahan pertanian dari masyarakat kelompok tani di desa sehingga adanya kecocokan terhadap data dalam data base e-RDCK, dan hal ini akan mempermudah untuk mengalokasikan pupuk bersubsidi untuk masyarakat kelompok tani di desa.
2. Sebaiknya petugas penyuluh lapangan melakukan koordinasi terhadap kantor Dinas Pertanian sebagai penanggung jawab dan sebagai pembina pelaksanaan program untuk mengetahui alokasi anggaran untuk operasionalisasi dalam mengimplementasikan program kartu tani di desa sehingga dapat mempermudah terhadap pelaksana di lapangan untuk mensosialisasikan dan menyalurkan program kartu tani di desa.
3. Sebaiknya petugas penyuluh lapangan melakukan penyuluhan dan bimbingan secara rutin sebagai bentuk tanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaannya sehingga

masyarakat kelompok tani di desa dapat mengetahui dan memahami manfaat dan tujuan dari program kartu tani di desa sehingga dapat mempermudah terhadap para petani memanfaatkan kartu tani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Atmodjo, dan Fauziah. 2007. *Manajemen Stewarding*. PT Andi, Yogyakarta.
- Fauziah dan Atmodjo,. 2007. *Manajemen Stewarding*. PT Andi, Yogyakarta.
- Moko, K. W., Suwanto, & Utama, B. W. (2017). Perbedaan persepsi petani terhadap program kartu tani di Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen. *Journal of Sustainable Agriculture*, 32(1), 9-13
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja. Rosdakarya.
- Kusmana, E., & Garis, R. R. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pertanian Oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Wilayah Binaan Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis. *Moderat: Jurnal Ilmiah*

- Ilmu Pemerintahan*, 5(4), 460-473.
- Rohman, Arif. 2009. *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2014. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, B 2012, *Kebijakan Publik*, CAPS, Yogyakarta
- Sumber Perundang-Undangan :**
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
- Peraturan Menteri Perdagangan No. 15/M-Dag/Per/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian
- Peraturan Menteri Pertanian No. 69/Permentan/SR.310/12/2016 tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian TA 2017
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020
- Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan
- Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi
- Peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 2011 tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
- Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor/11/Kpts/Sr.310/B/03/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2020